

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

United Malays National Organization (UMNO) adalah partai politik di Malaysia yang dideklarasikan oleh para elit politik dari etnis Melayu pada tanggal 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru.¹ Pendeklarasian UMNO dilatarbelakangi oleh adanya rencana Inggris untuk membentuk *Malayan Union* (Uni Malaya). *Malayan Union* merupakan negara merdeka di Semenanjung Malaya yang akan menggantikan *British Malaya* setelah Perang Dunia ke-2 berakhir. Sebagai negara merdeka, wilayah *Malayan Union* terdiri dari gabungan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang), Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis) dan Negeri-Negeri Selat (Pinang dan Malaka). Sedangkan wilayah Singapura berdiri sendiri dan tetap berada di bawah kontrol Inggris.

Terdapat tiga tujuan pembentukan *Malayan Union*, yaitu: (1) mengintegrasikan etnis Tionghoa dan India dalam persamaan politik melalui hukum-hukum kewarganegaraan yang liberal, (2) mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang tunggal dan terpusat, (3) menyiapkan kondisi untuk pada akhirnya etnis Melayu dapat mengatur diri mereka sendiri (*self*

¹Sejarah Penubuhan UMNO, <http://www.umno-online.my/sejarah/penubuhan-umno/>. diakses pada tanggal 8 Juni 2016.

government).² Berdasarkan tiga tujuan tersebut, pembentukan *Malayan Union* mendapat penolakan dari etnis Melayu. Etnis Melayu menilai bahwa pembentukan *Malayan Union* merupakan salah satu siasat Inggris untuk memperpanjang masa penjajahannya atas wilayah Semenanjung Malaya. Sebab apabila pembentukan *Malayan Union* terlaksana, maka kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu akan hilang. Sehingga Negeri-Negeri Melayu mengalami perubahan status dari protektorat menjadi jajahan atau koloni Inggris.

Sebagai aksi penolakan etnis Melayu terhadap rencana pembentukan *Malayan Union*, pada tanggal 1-4 Maret 1946 diadakan Kongres Melayu se-Malaya I di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baharu, Kuala Lumpur. Kongres tersebut diinisiasi oleh Persatuan Melayu Selangor dan diikuti oleh 41 perwakilan organisasi-organisasi Melayu.³ Pada tanggal 31 Maret 1946, Kongres Melayu se-Malaya II bersama raja-raja Melayu memboikot prosesi pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gubernur Jenderal *Malayan Union*.⁴ Kemudian pada tanggal 11 Mei 1946, Kongres Melayu se-Malaya III diadakan di Istana Besar Johor Bahru dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PKMB/PEKEMBAR) atau *United Malays National Organization* (UMNO) resmi dideklarasikan.⁵ Dato' Onn Jaafar (perwakilan dari Persatuan Melayu Johor) dikukuhkan sebagai Presiden UMNO yang pertama.

²Diane K. Mauzy, *Barisan Nasional*, dikutip dalam A. Effendy Choirie, 2008, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*, Jakarta: Pensil-324, hal. 78.

³Op. Cit.

⁴A. Effendy Choirie, 2008, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*, Jakarta: Pensil-324, hal. 80.

⁵Ibid.

Keberhasilan gerakan politik pribumi melawan pembentukan *Malayan Union* merupakan suatu kemenangan bagi etnis Melayu secara umum dan UMNO secara khusus. Selanjutnya, UMNO tumbuh menjadi kekuatan politik etnis Melayu yang paling dominan dan memimpin organisasi-organisasi Melayu lainnya. Bahkan UMNO turut membidani lahirnya negara Federasi Malaysia. Selain itu, UMNO juga menjadi tulang punggung bagi koalisi Barisan Nasional (BN) yang telah menguasai pemerintahan Malaysia sejak era kemerdekaan (31 Agustus 1957). Maka UMNO memiliki klaim historis atas politik dan pemerintahan Malaysia, sehingga ketika membahas Malaysia tentu akan menyinggung tentang UMNO.

Ketika Pilihan Raya Umum (PRU) diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2004, UMNO bersama BN memperoleh 198 dari 219 kursi Dewan Rakyat. Di lain sisi, gabungan partai oposisi memperoleh 20 kursi dan calon independen memperoleh 1 kursi.⁶ Kemenangan UMNO bersama BN memunculkan harapan rakyat akan adanya perubahan di Malaysia pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka, setelah Tun Abdullah Ahmad Badawi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-5, ia berjanji akan memberantas korupsi, memerangi kriminalitas, menurunkan harga dan menciptakan persatuan antaretnis. Janji perubahan yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadikan kepemimpinannya populer di mata rakyat Malaysia.

⁶Jamaie Hj Hamil, dkk., 2014, *Ikhtisar Analisis Pilihan Raya Umum 1978 hingga 2013 di Malaysia*, Geografia Online TM Malaysia Journal of Society and Space 10, hal. 46.

Pada PRU tahun 2008, UMNO bersama BN kehilangan 2/3 mayoritas suara di Parlemen. Sebab dari 222 kursi Dewan Rakyat yang diperebutkan, koalisi Barisan Nasional (BN) memperoleh 140 kursi dan koalisi Pakatan Rakyat (PR) memperoleh 82 kursi. BN juga kehilangan kekuasaan di 5 Negara Bagian (Kedah, Kelantan, Perak, Pulau Pinang dan Selangor) dan hanya memperoleh 3 dari 11 kursi Parlemen Wilayah Persekutuan. Selanjutnya, pada 16 kali Pilihan Raya Kecil (PRK) yang diselenggarakan setelah Pilihan Raya Umum (PRU) tahun 2008, kemenangan BN dan PR seimbang.⁷ Secara keseluruhan BN menjadi pemenang dalam PRU tahun 2008, akan tetapi ia mengalami penurunan jumlah suara/perolehan kursi jika dibandingkan dengan hasil PRU tahun 2004.

Hasil buruk dalam PRU tahun 2008 memaksa Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Presiden UMNO. Maka selanjutnya jabatan tersebut dipegang oleh Dato' Sri Najib Tun Razak. Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak, PRU tahun 2013 diselenggarakan. Hasil PRU tahun 2013 menunjukkan penurunan jumlah suara/perolehan kursi BN dan peningkatan jumlah suara/perolehan kursi PR jika dibandingkan dengan hasil PRU tahun 2008. Pada PRU tahun 2013 BN memperoleh 133 kursi Dewan Rakyat dan 344 kursi Dewan Undangan Negeri (DUN) dengan 5,2 juta suara, sedangkan PR memperoleh 89 kursi Dewan Rakyat dan 230 kursi Dewan Undangan Negeri (DUN) dengan 5,5 juta suara.⁸

⁷Ibid., hal. 47.

⁸Ibid., hal. 48.

Mundurinya Tun Dr. Mahathir Mohamad dari jabatan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 31 Oktober 2003 dianggap sebagai angin segar bagi kelompok oposisi untuk melakukan gerakan reformasi dan demokratisasi di Malaysia. Sebagian dari rakyat Malaysia khususnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan pendidikan dan pendapatan tinggi juga sangat menginginkan adanya perubahan. Mereka sudah jenuh dengan *status quo* yang dikekalkan oleh etnis Melayu melalui kekuasaan UMNO. Selain itu, muncul harapan agar Malaysia menjadi negara yang lebih adil dan transparan. Sehingga nantinya tidak ada lagi diskriminasi etnis dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau elit politik.

Rezim UMNO telah mengalami berbagai permasalahan dan tekanan baik di dalam maupun di luar partai (UMNO) dan koalisi (Barisan Nasional). Krisis politik yang menimpa rezim UMNO terkadang mengakibatkan perpecahan di kalangan anggota partai atau koalisi. Namun hebatnya, setiap kali terjadi krisis politik yang menimpa partai atau koalisi, rezim UMNO selalu berhasil memulihkan stabilitas dan melakukan penguatan kembali. Maka, rezim UMNO terbukti tetap bertahan memimpin Negara Federasi Malaysia dari tahun 1957 hingga 2015. Kuatnya hegemoni rezim UMNO dalam politik dan pemerintahan Malaysia membuat otoritas kerajaan Melayu turut berpihak kepadanya.

Selain dari dalam negeri (domestik), permasalahan dan tekanan yang menimpa rezim UMNO juga berasal dari luar negeri (internasional). Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Republik India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Uni Eropa secara tidak langsung pernah menggugat kebijakan

“*affirmative action*” yang selama ini diterapkan oleh rezim UMNO. Hubungan bilateral Malaysia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Federasi Rusia juga sempat memanas akibat insiden (kecelakaan) yang menimpa pesawat Malaysia Airlines MH370 dan MH17. Sedangkan terkait kasus korupsi dana investasi *IMalaysia Development Berhad* (1MDB) yang diduga melibatkan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak, Kepolisian Republik Singapura dan Divisi Penyelidikan Kasus Korupsi Internasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga turut melakukan investigasi di negara masing-masing.

Di lain sisi, Kerajaan Arab Saudi menjadi negara sekutu rezim UMNO yang mendukung kemenangan koalisi Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan Raya tahun 2013. Dukungan tersebut terungkap setelah terdapat aliran dana sebesar USD 681 juta dari keluarga Kerajaan Arab Saudi ke rekening pribadi Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan Maret 2013.⁹ Rezim UMNO berhasil memanfaatkan kepentingan Kerajaan Arab Saudi atas Federasi Malaysia menjadi dukungan politik bagi rezim UMNO untuk memenangkan koalisi Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan Raya tahun 2013. Maka hasilnya, partai pemerintah yang tergabung di koalisi Barisan Nasional (BN) keluar sebagai pemenang dalam Pilihan Raya tahun 2013. Kemenangan tersebut melanggengkan kekuasaan rezim UMNO dalam politik dan pemerintahan Malaysia untuk periode 5 tahun ke depan (2013-2017).

⁹Aliran Dana ke Rekening Najib Berasal dari Keluarga Saudi, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160126115959-106-106704/aliran-dana-ke-rekening-najib-berasal-dari-keluarga-saudi/>. diakses pada tanggal 08 April 2017.

Rezim UMNO seakan tidak terpengaruh oleh adanya perubahan sosial dan politik di negara-negara tetangga, seperti: Filipina (Revolusi 1987), Indonesia (Reformasi 1998), Thailand (kudeta militer) dan Myanmar (Reformasi 2013). Padahal banyak pihak memperkirakan rezim UMNO akan segera tumbang pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab kepemimpinan rezim UMNO yang baru jauh lebih demokratis dari era sebelumnya. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa rezim UMNO masih bertahan dalam politik dan pemerintahan Malaysia dari tahun 2003 hingga 2015. Bahkan rezim UMNO tetap berkuasa meskipun sedang dilanda krisis politik akibat skandal korupsi dana investasi 1MDB (*1Malaysia Development Berhad*) yang diduga kuat melibatkan beberapa pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak.

B. Rumusan Masalah

Mengapa rezim UMNO dapat tetap bertahan dalam politik dan pemerintahan Malaysia pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad 2003-2015?

C. Landasan Teori

1. Konsep Partai Politik

Sejarah perkembangan partai politik dimulai dengan lahirnya organisasi tersebut di negara-negara Eropa Barat pada akhir abad ke-19. Kelahiran partai politik dilatarbelakangi oleh meluasnya gagasan tentang kedaulatan rakyat. Gagasan tersebut menempatkan rakyat sebagai komponen (faktor) yang perlu

diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik (pengambilan keputusan). Sehingga partai politik dibentuk sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Seiring dengan meluasnya hak pilih, maka partai politik berkembang menjadi sarana bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan dan pengawasan negara.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁰ Kemudian Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.¹¹

Di negara yang demokratis, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutment politik dan sarana pengatur konflik. Sedangkan di negara yang otoriter, partai politik melakukan fungsi yang pelaksanaannya berbeda dengan partai politik di negara-negara yang demokratis. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik di negara otoriter menyebarluaskan informasi yang mengindoktrinasi masyarakat agar tunduk

¹⁰Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 403.

¹¹Ibid., hal. 404.

kepada pemimpin partai. Kemudian sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik di negara otoriter lebih menekankan diri pada aspek pembinaan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan partai. Dan sebagai sarana rekrutmen politik, para calon anggota partai politik di negara otoriter menjalani aktivitas politiknya dengan standar-standar yang ketat.

Berdasarkan konsep tersebut, *United Malays National Organization* (UMNO) adalah partai politik di Malaysia yang dideklarasikan oleh para elit politik dari etnis Melayu pada tanggal 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru.¹² Pendeklarasian UMNO dilatarbelakangi oleh adanya rencana Inggris untuk membentuk *Malayan Union* (Uni Malaya). *Malayan Union* merupakan negara merdeka di Semenanjung Malaya yang akan menggantikan *British Malaya* setelah Perang Dunia ke-2 berakhir. Pembentukan *Malayan Union* ditolak oleh etnis Melayu karena dipandang sebagai siasat Inggris untuk melonggarkan kolonialismenya di Semenanjung Malaya. Maka, UMNO muncul sebagai organisasi kebangsaan Melayu yang menentang neokolonialisme Inggris dan bercita-cita hendak mendirikan negara Melayu yang merdeka dan berdaulat.

Sebagai partai politik, UMNO memperjuangkan Islam dan nasionalisme konservatif (kebangsaan Melayu). Pemihakan UMNO terhadap Islam sejalan dengan pembelaannya atas nasionalisme Melayu, sebab Islam menjadi agama dan ideologi yang menyatu dengan identitas Melayu. Sehingga konstituen utama UMNO adalah masyarakat Muslim dan Melayu di Malaysia. Oleh karena itu,

¹²Sejarah Penubuhan UMNO, <http://www.umno-online.my/sejarah/penubuhan-umno/>. diakses pada tanggal 8 Juni 2016.

UMNO harus memperhatikan kepentingan Islam dan Melayu agar legitimasi politisnya sebagai partai politik Melayu tetap diakui. Sedangkan kontrol atau dominasi UMNO dalam struktur politik dan pemerintahan Malaysia bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai partai pemerintah. Partai UMNO berusaha menciptakan *status quo* untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan yang bersifat idiil dan materiil bagi konstituennya, seperti konservatisme (ketuanan golongan *Bumiputera*), *privilege* (pemberian hak-hak istimewa kepada golongan *Bumiputera*), *affirmative action* (pemberdayaan golongan *Bumiputera* di bidang ekonomi dan pendidikan), serta stabilitas sosial dan politik dalam negeri.

2. Konsep Kekuasaan (*power*)

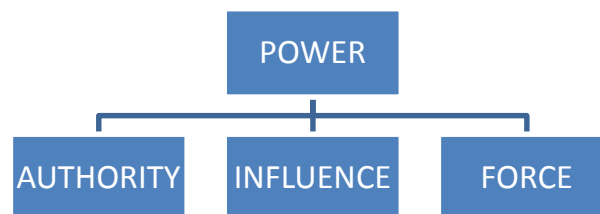
Konsep kekuasaan (*power*) biasanya digunakan untuk menunjukkan “kekuasaan politik” yang dimiliki oleh individu, kelompok atau negara. Maka tidak heran apabila konsep *power* erat kaitannya dengan konsep “negara” dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Konsep *power* bahkan dianggap sebagai konsep dasar dari ilmu hubungan internasional.¹³ Menurut Hans J. Morgenthau, kekuasaan (*power*) adalah pengendalian manusia atas pikiran dan tindakan manusia lainnya. Sedangkan kekuatan politik adalah hubungan pengawasan yang timbal-balik antara pemegang wewenang (pemerintah/pimpinan) dengan rakyat/bawahan yang dipimpinnya. Kekuatan politik dapat pula dikatakan sebagai hubungan psikologis antara pihak pelaksana dengan pihak yang terkena.¹⁴

¹³Scott Burchill & Andrew Linklater, 1996, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 242.

¹⁴Hans J. Morgenthau, 2010, *Politik Antarbangsa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 34.

Coulombis dan Wolfe mendefinisikan konsep kekuasaan (*power*) secara lebih luas sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Maka, konsep kekuasaan (*power*) memiliki tiga unsur didalamnya, yakni: daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*) dan wewenang (*authority*).¹⁵ Daya paksa (*force*) didefinisikan sebagai ancaman eksplisit melalui penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik aktor A. Pengaruh (*influence*) didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A terhadap aktor B agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Wewenang (*authority*) didefinisikan sebagai sikap tunduk aktor B terhadap arahan (perintah/nasehat) aktor A. Sikap tunduk tersebut dapat dikarenakan adanya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, pengakuan mutu kepemimpinan, pengetahuan atau keahlian aktor A oleh aktor B. Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *power* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

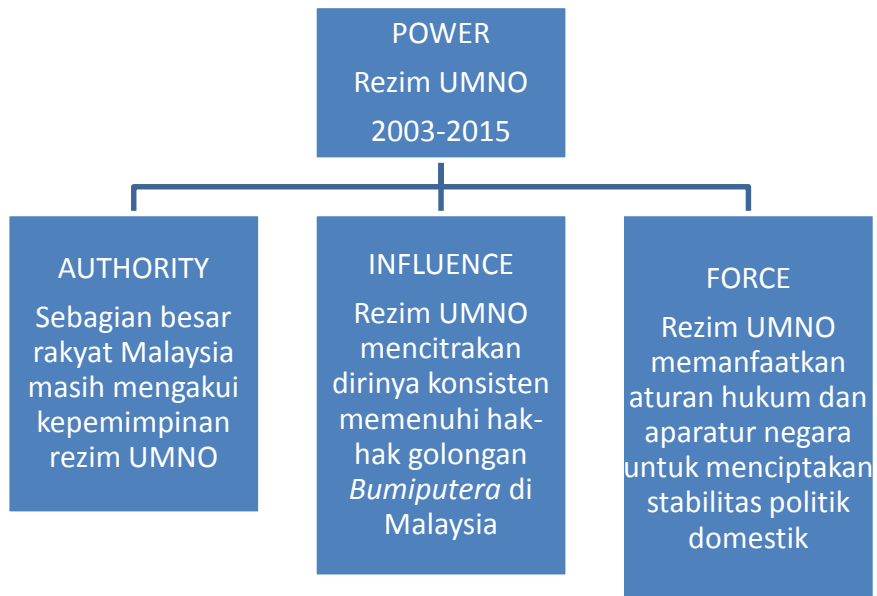
Gambar 1.1 Unsur-Unsur “Power”



Sumber: Morgenthau, Hans J. *Politic Among Nations*, dikutip dalam Mas' oed, Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 119.

¹⁵Theodore A. Coulombis & John H. Wolfe, *Introduction to International Relations*, dikutip dalam Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 118.

Gambar 1.2 Aplikasi Konsep “Power”



Tiga unsur dalam konsep kekuasaan (*power*) dapat digunakan untuk menganalisis rumusan masalah. *Pertama*, daya paksa (*force*) rezim UMNO diwujudkan dengan memanfaatkan aparatur negara seperti birokrat, polisi, tentara dan lain sebagainya untuk menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Selain itu, berbagai peraturan hukum seperti Akta Hasutan 1948, ISA (*Internal Security Act*) 1960, Akta Polis 1967, AUKU (Akta Universiti dan Kolej Universiti) 1971, Akta Pertubuhan 1972, OSA (*Official Secrets Act*) 1972, POTA (*Prevention Of Terrorism Act*) 2015 dan lain sebagainya digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan masyarakat yang berpotensi melawan rezim. Penggunaan aparatur negara dan peraturan hukum memungkinkan rezim UMNO untuk menahan pihak-pihak yang dituduh mengancam keamanan nasional.¹⁶

¹⁶Sulastry Yurni Ahmad, *Penguatan Budaya Politik Hegemoni Kepemimpinan Melayu dalam Demokrasi Malaysia*, dalam *Politik dan Perubahan: Antara Reformasi Politik di Indonesia dan Politik Baru di Malaysia*, diedit oleh Leo Agustino, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. 240.

Kedua, pengaruh (*influence*) rezim diwujudkan dengan memposisikan UMNO sebagai partai politik yang mewakili kepentingan masyarakat golongan *Bumiputera* (penduduk pribumi) khususnya etnis Melayu. Maka rezim UMNO menjadi penyokong agama Islam, adat istiadat, bahasa dan kerajaan Melayu. Sehingga tercipta suatu opini bahwa kesejahteraan hidup, pembangunan sosio-ekonomi dan perlindungan hak-hak penduduk pribumi di Malaysia sangat bergantung kepada kepemimpinan UMNO. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat dari golongan *Bumiputera* khususnya etnis Melayu harus berjuang bersama UMNO untuk meraih kemenangan dan mempertahankan kekuasaan. Sebab pemerintahan UMNO menjadi simbol ketuanan pribumi atas tanah airnya sendiri. Melalui cara-cara tersebut, rezim UMNO berhasil menciptakan “hegemoni intelektual” dalam pemikiran dan tindakan masyarakat golongan *Bumiputera* khususnya etnis Melayu.¹⁷

Ketiga, wewenang (*authority*) rezim UMNO diterima oleh sebagian besar rakyat Malaysia karena kepemimpinannya telah terbukti berhasil melakukan pembangunan dan modernisasi negara di bidang ekonomi, industri, infrastruktur, IPTEK, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Selain itu, rezim UMNO juga dipandang konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat golongan *Bumiputera* yang merupakan penduduk mayoritas di Malaysia. Sehingga rezim UMNO masih didukung dan dipatuhi oleh sebagian besar rakyat Malaysia. Selain itu, wewenang (*authority*) yang dimiliki oleh rezim UMNO sebagai pemerintah

¹⁷Zaini Othman, *Fase dan Perubahan Dalam Pembangunan Politik Malaysia*, dalam *Politik dan Perubahan: Antara Reformasi Politik di Indonesia dan Politik Baru di Malaysia*, diedit oleh Leo Agustino, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. 171.

Malaysia juga memberi peluang untuk memenangkan Pilihan Raya dengan mengintervensi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dan media massa.

3. Teori Propaganda

Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa propaganda adalah suatu bentuk kontrol opini melalui simbol-simbol yang mempunyai arti. Propaganda bertujuan untuk mencapai dukungan massa terhadap kepentingan pihak propagandis. Propaganda dapat berbentuk kata-kata, gambar, lagu-lagu, parade dan sarana lainnya yang mampu memprovokasi publik. Selain itu, propaganda juga dapat disampaikan dalam bentuk pendapat atau informasi yang konkret dan akurat melalui media massa. Maka, media massa sebagai sarana komunikasi sosial menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan propaganda sehingga membentuk (memanipulasi) sikap kolektif secara serentak.

Sedangkan menurut Coloumbis dan Wolfe, propaganda merupakan salah satu metode (cara) yang biasa digunakan oleh negara atau rezim tertentu untuk mengamankan, memelihara dan menerapkan kekuasaan (*power*) dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud tentulah berdasarkan kepentingan rezim. Sehingga kepentingan nasional pada akhirnya diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan rezim.

Teori propaganda dapat digunakan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh rezim UMNO dalam rangka mempertahankan kekuasaan. *Pertama*, rezim UMNO menggunakan simbol-simbol seperti adat istiadat Melayu, bahasa Melayu, kerajaan Melayu dan agama Islam untuk menunjukkan bahwa

pemerintahannya menjamin kedaulatan golongan *Bumiputera* khususnya etnis Melayu. Oleh karena itu, rezim UMNO berusaha mempertahankan eksistensi kerajaan Melayu yang menjadi simbol supremasi etnis Melayu di Negara Federasi Malaysia. Sehingga pada akhirnya, keislaman dan kemelayuan bersama-sama dengan sistem monarki (kerajaan) menjadi unsur-unsur yang membentuk konsepsi keamanan nasional di Malaysia.¹⁸ Maka, upaya rezim UMNO dalam melestarikan ketiganya menarik perhatian dan simpati dari masyarakat etnis Melayu.

Kedua, kepemimpinan UMNO yang didukung oleh koalisi Barisan Nasional (BN) memanfaatkan media massa sebagai sarana komunikasi sosial untuk membentuk (memanipulasi) sikap kolektif. Media massa dalam bentuk cetak yang pro-pemerintah, antara lain: Bernama, Utusan Malaysia dan *The Star*.¹⁹ Sedangkan media massa dalam bentuk visual yang pro-pemerintah, antara lain: Radio Televisyen Malaysia (RTM), Media Prima Berhad (khususnya TV3) dan TV Al-Hijrah.²⁰ Melalui media massa yang pro-pemerintah, rezim UMNO mempublikasikan informasi atau laporan-laporan tentang sisi positif (kebaikan dan keberhasilan) dari kepemimpinannya.

Sebagian besar media massa arus utama di Malaysia tunduk kepada rezim UMNO. Sehingga media massa yang pro-oposisi sangat bergantung kepada jaringan internet dan penerbitan tabloid. Media massa dalam bentuk tabloid yang

¹⁸Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 123.

¹⁹Pemerintah Malaysia Masih Kekang Kebebasan, <http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/234994-pemerintah-malaysia-masih-kekang-kebebasan>. diakses pada tanggal 17 Oktober 2016.

²⁰Berita Televisi di Malaysia: Hati Nurani vs Tuntutan Rezim, <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601130424-322-135019/berita-tv-di-malaysia-hati-nurani-vs-tuntutan-rezim/>. diakses pada tanggal 17 Oktober 2016.

pro-oposisi, antara lain: *Harakah* (PAS), *The Rocket* (DAP), Suara PRM (PRM) dan Suara Keadilan (PKR). Sedangkan media massa dalam bentuk online yang bersikap kritis terhadap rezim UMNO, antara lain: www.astroawani.com, www.freemalysiatoday.com, www.malaysiakini.com, www.malaysia-today.net, www.themalaysianinsider.com dan lain sebagainya. Media massa yang bertentangan dengan rezim UMNO dicap sebagai penebar fitnah atau pembangkang. Bahkan rezim UMNO dapat membredel atau memblokir media massa yang dinilai bersikap terlalu kritis terhadap pemerintahannya dengan tuduhan menghasut atau mengancam stabilitas keamanan nasional.

D. Hipotesa

Rezim UMNO dapat tetap bertahan dalam politik dan pemerintahan Malaysia pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad 2003-2015 karena:

1. Rezim UMNO yang berkuasa dalam politik dan pemerintahan Malaysia menggunakan hukum (konstitusi dan undang-undang), simbol negara (agama Islam, adat istiadat, bahasa dan kerajaan Melayu), serta aparatur negara (birokrat, militer, polisi) sebagai alat untuk melakukan pemaksaan (*force*) terhadap rakyat Malaysia. Sehingga rakyat Malaysia secara sukarela atau terpaksa tunduk kepada rezim UMNO.
2. Rezim UMNO menggunakan media massa sebagai alat propaganda untuk memengaruhi (*influence*) opini publik dan menyerang lawan politik. Selain itu, rezim UMNO juga menggunakan pendekatan kultural (hubungan *patron-*

client) melalui politik konsensus dalam koalisi Barisan Nasional (BN) untuk meraih kepercayaan dan dukungan dari masyarakat non-Melayu.

3. Golongan *Bumiputera* (etnis Melayu dan suku asli) yang merupakan penduduk mayoritas di negara Federasi Malaysia masih memberi penghormatan, kepercayaan dan dukungan kepada rezim UMNO. Sebab rezim UMNO dinilai berjasa dalam meraih kemerdekaan negara, melakukan pembangunan dan modernisasi negara, serta konsisten memperjuangkan hak-hak penduduk pribumi dan agama Islam. Sehingga sebagian besar rakyat Malaysia mengakui wewenang (*authority*) yang dimiliki oleh rezim UMNO sebagai pemimpin (pemerintah) di Negara Federasi Malaysia.
4. Rezim UMNO melakukan berbagai tindakan manipulatif atau kecurangan dalam Pilihan Raya. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan dominasi partai penguasa dalam politik dan pemerintahan Malaysia. Maka, UMNO bersama koalisi Barisan Nasional (BN) melakukan tindakan menghasut (*black campaign*), politik uang (*money politics*) dan mengintervensi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebagai lembaga penyelenggara Pilihan Raya di Malaysia. Selain itu, rezim UMNO juga terbukti melakukan tindakan sabotase di beberapa pos undi (TPS) pada saat Pilihan Raya berlangsung.
5. Rezim UMNO memiliki kemampuan diplomasi yang baik sehingga berhasil mendapatkan dukungan dari Kerajaan Arab Saudi untuk memenangkan Pilihan Raya tahun 2013. Selain itu, rezim UMNO juga berhasil menghadapi tekanan internasional dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, RRT dan Uni Eropa yang hendak mencampuri politik dalam negeri Malaysia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Mengamati dinamika (perkembangan) politik dan pemerintahan yang terjadi di Malaysia melalui media massa berupa koran, televisi ataupun internet.
- c. Menghimpun data-data dari jurnal, majalah, surat kabar dan ensiklopedia, serta mencari informasi melalui situs internet milik lembaga atau instansi resmi baik yang dikelola oleh *government* maupun *non-government* yang berkaitan dengan UMNO dan Malaysia.

2. Metode Analisis Data

Menghimpun dan menyusun data secara sistematis, faktual dan cermat dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian menggunakan metode korelasional dengan unit analisis perilaku kelompok (rezim UMNO) untuk menganalisis hubungan di antara data-data atau variable yang telah dihimpun guna menguji hipotesis atau melakukan prediksi.

3. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang politik dan pemerintahan Malaysia dengan fokus penelitian terkait daya tahan rezim UMNO pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yakni dalam rentang waktu tahun 2003-2015. Tahun 2003 dipilih sebagai awal penelitian karena pada tanggal 31 Oktober 2003 Tun Dr. Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Malaysia setelah sebelumnya berkuasa sejak

tanggal 16 Juli 1981. Setelah mundurnya Tun Dr. Mahathir Mohamad, gerakan oposisi di Malaysia seakan memperoleh kesempatan baru untuk kembali bersuara pasca dibungkam oleh rezim otoriter. Sedangkan tahun 2015 digunakan sebagai batas akhir penelitian karena hingga akhir tahun tersebut, rezim UMNO masih mampu mempertahankan kekuasaannya dalam politik dan pemerintahan Malaysia.

F. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kondisi politik dan pemerintahan Malaysia pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad 2003-2015.
2. Daya tahan rezim UMNO dalam politik dan pemerintahan Malaysia 2003-2015.
3. Pengaruh daya tahan rezim UMNO terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia serta di Asia Tenggara.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan dan Aplikasi Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang sifatnya umum dan mendasar berkaitan dengan karya tulis (skripsi) ini. Selanjutnya pembahasan dalam Bab I akan menjadi titik tolak bagi pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II merupakan bab yang berisi penjelasan tentang dinamika partai UMNO sebagai kekuatan etnis Melayu dalam politik dan pemerintahan Malaysia tahun 1957-2015. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan ulasan tentang sejarah pembentukan UMNO yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Semenanjung Malaya dan Federasi Malaysia. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang sistem politik dan pemerintahan Malaysia yang berbentuk monarki konstitusional. Setelah mengetahui tentang sejarah pembentukan UMNO beserta sistem politik dan pemerintahan Malaysia, maka pembahasan akan menuju ke studi kasus tentang dinamika UMNO sebagai partai penguasa sejak era Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Perdana Menteri ke-1) hingga Dato' Sri Najib Tun Razak (Perdana Menteri ke-6).

BAB III merupakan bab yang berisi penjelasan tentang berbagai permasalahan dan tekanan yang dihadapi oleh rezim UMNO selama tahun 2003-2015. Pada bab ini akan dibahas berbagai permasalahan dan tekanan yang menimpa rezim UMNO dan berasal dari dalam negeri (domestik), seperti skandal pejabat atau elit politik rezim UMNO, manuver politik dari kelompok oposisi, konflik internal di tubuh UMNO atau BN, konflik antar masyarakat (sosial) dan lain sebagainya. Selain itu juga akan dibahas permasalahan dan tekanan yang menimpa rezim UMNO dan berasal dari luar negeri (internasional), seperti intervensi asing dan dinamika politik luar negeri Malaysia.

BAB IV merupakan Bab yang berisi penjelasan tentang aplikasi konsep kekuasaan (*power*), teori propaganda dan konsep partai politik dalam realitas tindakan politik rezim UMNO untuk mempertahankan kekuasaannya pasca

kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad (tahun 2003-2015). Pada bab ini akan dibahas tentang penggunaan 3 unsur *power*, yakni: *force*, *influence* dan *authority* oleh rezim UMNO. Juga akan dibahas tentang strategi rezim UMNO dalam menciptakan hegemoni intelektual (opini publik) sesuai dengan teori propaganda. Sedangkan konsep partai politik akan memberi penjelasan tentang karakteristik UMNO sebagai suatu organisasi politik (partai politik) yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengelola berbagai permasalahan, tekanan dan dukungan yang ada.

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari setiap pembahasan yang ada di dalam karya tulis (skripsi) ini. Kesimpulan tersebut merupakan ringkasan dari isi perbab yang kemudian digabung menjadi satu. Gabungan dari kesimpulan-kesimpulan perbab menjadi jawaban atas rumusan masalah pada Bab Pendahuluan (BAB I).